

MEMPERBAIKI TARAF HIDUP RAKYAT DI DESA-DESA

Oleh Nurcholish Madjid

Pemerintah telah mengeluarkan sebuah keputusan penting di bidang ekonomi yang kemudian dikenal dengan “Kebijaksanaan 19 November”. Menteri Ekuin dan Ketua Bappenas Prof. Widjojo mengatakan bahwa 75 juta rakyat Indonesia akan merasakan manfaat kebijaksanaan itu. Dan dalam suatu keterangannya, Menteri Pertanian Prof. Thojib Hadiwidjaja mengemukakan tentang tiga tujuan pokok kebijaksanaan tersebut, yaitu, *pertama*, peningkatan produksi pangan menuju swasembada dan perbaikan gizi; *kedua*, peningkatan daya beli rakyat tani yang juga berarti peningkatan tingkat kesejahteraan mereka; dan *ketiga*, menggairahkan peningkatan produksi di berbagai bidang perekonomian lainnya.

Dikatakan selanjutnya bahwa kenaikan harga pupuk dari Rp 40,00 menjadi Rp 60,00 memang akan terasa berat jika tidak diimbangi dengan kebijaksanaan-kebijaksanaan lainnya. Karena itu dilakukanlah peningkatan paket kredit dan kenaikan harga padi gabah pada bulan Februari mendatang.

Yang cukup menarik untuk diperhatikan adalah keterangan yang bernada optimistik dari Menteri Ekuin bahwa pada saat ini telah terjadi perbaikan taraf hidup para petani di bidang sandang, pangan dan papan. Sedangkan dalam bidang cara hidup juga terjadi modernisasi yang positif. Misalnya dalam memproses jadi, sistem tumbuk, ani-ani dan derep menjadi giling, babat, borongan, dan seterusnya.

Memang merupakan kenyataan yang tak dapat disangkal bahwa telah terjadi peningkatan taraf hidup para petani. Hal ini adalah disebabkan oleh efek pergandaan (*multiplying effect*) dari hasil pembangunan secara keseluruhan, terutama hasil-hasil yang sudah dicapai dalam pembinaan bidang-bidang yang tergolong ke dalam prasarana, misalnya jalan-jalan raya. Banyak pelosok-pelosok daerah, tak terkecuali pula Pulau Jawa, yang menyaksikan untuk pertama kalinya jalan-jalan raya berlapis aspal di sekitarnya. Seperti dapat diduga, dan malahan memang menjadi harapan dari semula, jalan-jalan raya itu mendorong terjadinya banyak sekali ragam kegiatan ekonomi. Mobilitas manusia dan barang menjadi sangat mudah. Investasi di bidang jasa angkutan merupakan gejala umum di daerah-daerah.

Hal-hal tersebut itu, dan banyak lagi hal-hal lainnya, pasti mempunyai pengaruh yang langsung kepada pola-pola kehidupan masyarakat. Tetapi masih terdapat ruang kekhawatiran, bahwa apa yang tampak oleh mata sebagai kenaikan taraf hidup itu tidak lain ialah kenaikan taraf konsumsi saja. Jadi justru mempunyai akibat yang bersifat kontra-produktif, meskipun mungkin masih ada faktor pengimbang untuk sebagian seperti cukup rendahnya barang-barang konsumsi tertentu. Apalagi jika ada yang dijadikan indikasi kenaikan taraf hidup itu kita batasi kepada gejala-gejala mencolok seperti pemilikan pesawat radio, kendaraan bermotor (di daerah terutama sepeda motor), dan lain sebagainya. Maka jelas sekali sifat konsumtif daripada pola hidup itu.

Malahan termasuk pula apa yang oleh Menteri Pertanian dimasukkan ke dalam gejala modernisasi kehidupan para petani. Misalnya penggantian cara tumbuk dengan cara penggilingan yang masinal (menggunakan mesin-mesin). Untuk sebagian besar masyarakat pertanian, pergantian itu hanya merupakan gejala konsumtif, bukan produktif. Sebab hal itu tidak menambah produksi apa-apa, kecuali barangkali penyingkatan waktu saja. Sedangkan di segi lain mengakibatkan munculnya orang-orang yang tak berpenghasilan, yaitu yang terdiri dari orang yang

kehilangan pekerjaan menumbuk padi. Mereka ini sudah tentu terdiri dari orang-orang yang kurang mampu. Sedangkan yang memiliki mesin-mesin penggiling padi sudah barang tentu adalah orang-orang yang mampu. Sehingga di desa-desa pertanian terdapat pameo bahwa sekarang banyak orang-orang kaya yang menjadi “buruh nutu” (buruh menumbuk padi), yaitu dengan mesin-mesin giling yang mereka miliki.

Apakah di pedesaan tidak terjadi kenaikan produksi sama sekali? Tentu saja terjadi kenaikan produksi. Secara singkatnya kenaikan itu adalah akibat adanya intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian. Tetapi yang menjadi pertanyaan ialah apakah kenaikan produksi itu betul merupakan dasar gejala-gejala kehidupan yang dinilai sebagai indikator kenaikan taraf hidup tersebut? Sebab sebagaimana dikatakan oleh HKTI, para petani sampai detik ini masih lebih merupakan masyarakat produsen (memproduksi hasil-hasil pertanian), tanpa kekuasaan atas sektor pemasaran. Sektor pemasaran masih dikuasai oleh orang-orang lain, yaitu para pedagang dan tengkulak, yang secara kebetulan umumnya terdiri dari orang-orang nonpribumi.

Maka salah satu cara yang singkat tetapi cukup strategis ditinjau dari segi kepentingan kaum tani dalam menaikkan taraf hidup mereka ialah menjadikan mereka penguasa atas sektor pemasaran hasil produksi mereka sendiri. Kalau hal ini tak mungkin terjadi, atau katakanlah sulit sekali, maka yang dapat dilakukan ialah melindungi kepentingan kaum tani itu dengan suatu kebijaksanaan politik sehingga mereka dapat secara adil menikmati hasil jerih payah mereka. Sudah tentu langkah pertama ialah menetapkan harga barang hasil pertanian secara pantas menurut ukuran petani. Jadi peranan mutlak terletak pada pemerintah. Tetapi hal ini agaknya menyangkut masalah lain, yaitu orientasi politik. Yang dimaksud ialah apakah pemerintah dalam orientasinya lebih memperhitungkan masyarakat kota yang berekonomi uang atau masyarakat desa yang berekonomi barang (*natura*). Sebab menaikkan harga hasil pertanian adalah merugikan yang pertama

dan menguntungkan yang kedua, sedangkan sebaliknya menekan harga itu adalah menguntungkan yang pertama dan merugikan yang kedua. Dasar benarnya orientasi kota ialah karena gejolak politik yang mengganggu stabilitas hanya datang dari kota. Tetapi perlu diingatkan bahwa sebagian besar secara mutlak rakyat kita adalah penduduk desa-desa. [❖]